

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang pernah diperoleh atau pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang digunakan sebagai kajian dan bahan masukan bagi peneliti sehingga peneliti bisa menjadikannya sebagai tolak ukur atas hasil yang telah dicapai. Penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yang memiliki variabel yang sama dengan peneliti yaitu Pemberdayaan Perempuan. Adapun Referensi yang Penulis jadikan Referensi yaitu sebagai berikut:

- 1. Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nururrochman Hidayatullah (2015). Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan. Jurnal penelitian Kesejahteraan Sosial 2 : Yogyakarta**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi kinerja KUBE dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota KUBE, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KUBE dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja KUBE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja KUBE dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggota KUBE bervariasi. Ada KUBE yang berkinerja baik dan mampu meningkatkan pendapatan anggotanya, namun ada juga yang berkinerja kurang baik dan tidak mampu mencapai tujuannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja KUBE antara lain faktor internal seperti kemampuan dan komitmen pengurus, motivasi dan partisipasi

anggota KUBE, kesatuan dan kekompakan kelompok; faktor eksternal yaitu dukungan pemerintah, ketersediaan modal dan sumber daya, kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memiliki potensi yang besar dalam pengentasan kemiskinan. Tujuan KUBE adalah meningkatkan pendapatan dan taraf hidup anggotanya sehingga tercapai pengentasan kemiskinan. Pencapaian tujuan KUBE memerlukan berbagai upaya meningkatkan kinerja, baik dari sisi pemerintah, pendamping, maupun anggota KUBE.

2. Haryati. R (2013). Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI : Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan rekomendasi terkait efektivitas program KUBE dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program KUBE memiliki efek positif terhadap pendapatan dan taraf hidup anggota KUBE seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas program KUBE.

3. Rani Pratiwi dan Agus Hendrayadi (2020). Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Malangrapat. Universitas maritim raja ali haji Kepulauan Riau

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis proses pemberdayaan, Mengidentifikasi, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan perempuan melalui KUBE dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas KUBE dalam pemberdayaan perempuan. Penelitian ini menggunakan

Metode Penelitian melalui pendekatan Kualitatif dengan studi kasus dan Teknik Pengumpulan Data Observasi partisipan, Wawancara mendalam dengan anggota KUBE, pengurus desa, dan dinas terkait. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa KUBE di Desa Malang Rapat memiliki peran penting dalam pemberdayaan perempuan. KUBE dengan menganalisis proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan serta mengidestripsikan mengenai faktor penghambat dan pendukung Program KUBE.

Tabel 2.1 Keterikatan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang sedang dilaksanakan

No	Judul, Peneliti, Tahun Penelitian	Teori yang melandasi	Metode Penelitian	Temuan yang dihasilkan
1.	Kinerja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Pengentasan Kemiskinan. (Sri Yuni Murti Widayanti dan A. Nururrochman Hidayatulloh, 2015).	Teori khusus yang digunakan sebagai landasan Penelitian ini mengenai teori pemberdayaan menurut Istiana Hermawati (2011), <i>Sustainable Livelihoods, Collective Action</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan metode analisis data secara kualitatif dan dianalisis secara diskriptif interpretative serta menggunakan pendekatan Studi kasus <i>desaininforman</i> teknik	Temuan yang dihasilkan yang digunakan dalam penelitian ini berupa kinerja Kelompok Usaha Bersama dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Kelompok Usaha Bersama

2.	Kebijakan Penanganan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). (Haryati. R. 2013)	Teori Khusus yang digunakan sebagai landasan Penelitian ini yaitu mengenai teori Kebijakan Penanganan Kemiskinan dan teori mengenai Program Kelompok Usaha Bersama menurut Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Republik Indonesia . Buku Petunjuk Pengembangan Usaha Keluarga Binaan Sosial dalam Kelompok Usaha Bersama (2006)	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan analisis data	Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu dampak dari Program Kelompok Usaha Bersama dalam penanganan Kemiskinan
3.	Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Malangrapat. (Rani Pratiwi dan Agus Hendrayadi.	Teori khusus yang digunakan sebagai landasan Penelitian ini adalah mengenai	Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus dan Teknik	Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu proses

	2020)	Proses Pemberdayaan yaitu menggunakan teori Wrihatnolo (2007)	Pengumpulan Data Observasi partisipan, serta Wawancara mendalam	pemberdayaan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan serta faktor penghambat dan pendukung Program KUBE
--	-------	---	---	---

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2024

Berdasarkan dalam tabel 2.1 terdapat variabel yang sama diantara ketiganya dan dengan topik pembahasan yang sama pula, yaitu terkait Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan cakupan dan lokasi penelitian yang berbeda. Terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Inovasi pada penelitian ini terletak pada Pemberdayaan Kemiskinan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi melalui KUBE, sedangkan penelitian sebelumnya hanya fokus pada pelaksanaan program KUBE. Fokus utama penelitian ini adalah menggali mengenai keberhasilan, dampak serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pemberdayaan berbagai aspek kemampuan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) melalui Program KUBE di Desa Tenjolaya Kecamatan Pasirjambu dengan memeriksa elemen internal yang mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan. Ini merupakan aspek yang masih kurang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya dalam kurun waktu satu dekade terakhir.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Tinjauan Mengenai Pemberdayaan

2.2.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Robert Adams (2003: 8) mengemukakan pengertian Pemberdayaan sebagai berikut:

Pemberdayaan merupakan sarana yang digunakan individu, kelompok dan/atau komunitas untuk mampu mengendalikan keadaan mereka dan mencapai tujuan mereka sendiri, sehingga mampu berupaya membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk memaksimalkan kualitas hidup mereka, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Jadi pemberdayaan merupakan tempat/sarana yang digunakan individu, kelompok, dan komunitas untuk mencapai kemandirian, berpartisipasi sosial, dan peningkatan kualitas hidup mereka.

Zastrow (2015: 50) mengemukakan bahwa pengertian pemberdayaan sebagai berikut *“Empowerment is the process of helping individuals, families, groups, organizations, and communities to increase their interpersonal, personal, political, and socioeconomic strengths so that they can improve their circumstances.”* Pernyataan di atas menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah proses membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas untuk meningkatkan kekuatan interpersonal, personal, politik, dan sosial ekonomi sehingga mereka dapat memperbaiki keadaannya. kekuatan yang ingin diberdayakan mempunyai 4 kekuatan/kemampuan yaitu : kekuatan interpersonal, personal, sosial-ekonomi dan politik jadi Pemberdayaan PRSE adalah proses membantu PRSE dalam meningkatkan kemampuan Personal, interpersonal, sosial-ekonomi dan politik untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka.

2.2.1.2 Unsur-unsur pemberdayaan

Zastrow (2015: 50) mengemukakan pengertian pemberdayaan sebagai berikut: “*Empowerment is the process of helping individuals, families, groups, organizations, and communities to increase their interpersonal, personal, political, and socioeconomic strengths so that they can improve their circumstances.*” Pernyataan di atas menyatakan bahwa Pemberdayaan adalah proses membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas untuk meningkatkan kekuatan interpersonal, personal, politik, dan sosial ekonomi sehingga mereka dapat memperbaiki keadaannya. Pengertian tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Proses membantu individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan komunitas (*the process of helping individuals, families, groups, and communities*).
2. Meningkatkan kekuatan/kemampuan personal, interpersonal, sosial-ekonomi, dan politik mereka (*increase their personal, interpersonal, socioeconomic, and political strength*).
3. Mengembangkan agar memperbaiki atau meningkatkan kehidupan mereka (*develop influence toward improving their circumstances*).

2.2.1.3 Jenis-jenis Pemberdayaan

Zastrow (2017: 274-278) mengemukakan adanya 4 jenis kemampuan orang yang diberdayakan yaitu sebagai berikut:

1. Kemampuan Personal

Kemampuan ini mencakup peningkatan kepercayaan diri, pengendalian diri, dan kesadaran diri. Individu yang memiliki kemampuan personal yang baik

akan lebih mampu mengenali potensi diri mereka, menetapkan tujuan, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka juga akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dan rintangan.

2. Kemampuan Interpersonal

Kemampuan ini melibatkan keterampilan dalam berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang efektif dengan orang lain. Individu dengan kemampuan interpersonal yang baik dapat berinteraksi dengan orang lain secara efektif, memahami perspektif orang lain, dan bekerja dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan seperti empati, mendengarkan aktif, dan resolusi konflik juga termasuk dalam kemampuan ini.

3. Kemampuan Sosial Ekonomi

Kemampuan ini berkaitan dengan pemahaman dan pengelolaan sumber daya ekonomi, seperti keuangan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan sosial. Individu yang memiliki kemampuan sosial ekonomi yang baik dapat mengelola keuangan pribadi atau kelompok secara efektif, memahami dinamika pasar kerja, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Mereka juga dapat mengakses dan menggunakan layanan sosial yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. Kemampuan Politik

Kemampuan ini mencakup pemahaman tentang sistem politik dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu dan komunitas. Individu dengan kemampuan politik yang baik dapat mengadvokasi hak-hak mereka,

berpartisipasi dalam organisasi atau gerakan sosial, dan mempengaruhi kebijakan publik yang relevan. Mereka juga memiliki keterampilan dalam negosiasi, advokasi, dan pembentukan jaringan yang luas.

2.2.2 Tinjauan tentang Kemiskinan dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

2.2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Peraturan Kementerian Sosial No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman umum Penanganan Fakir miskin pasal 1 ayat 3 mengemukakan bahwa: “Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan individu, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.” Zastrow (2017: 5) mengemukakan pengertian kemiskinan yaitu “*Poverty is a condition in which individuals, families, or groups do not have sufficient resources to meet their basic needs for survival.*” Pengertian di atas menyatakan bahwa: “Kemiskinan adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk hidup.” Jadi kemiskinan adalah keadaan kekurangan yang signifikan, di mana individu, keluarga, atau kelompok tidak memiliki akses terhadap sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

2.2.2.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Zastrow (2017: 144-147) mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi pada kemiskinan, antara lain:

1. Faktor struktural: seperti diskriminasi, kurangnya kesempatan kerja, dan akses yang tidak memadai ke pendidikan dan layanan kesehatan.
2. Faktor individu: seperti kurangnya keterampilan, kecacatan, dan penyakit kronis.
3. Faktor keluarga: seperti keluarga besar, pengasuhan tunggal, dan kekerasan dalam rumah tangga.

2.2.2.3 Dampak Kemiskinan

Kemiskinan dapat memiliki dampak yang signifikan pada individu, keluarga, dan masyarakat. Dampak ini dapat meliputi:

1. Kesehatan yang buruk: Kemiskinan dikaitkan dengan tingkat kesehatan yang lebih rendah, termasuk tingkat kematian dan penyakit yang lebih tinggi.
2. Pendidikan yang rendah: Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan lebih mungkin putus sekolah dan memiliki prestasi belajar yang lebih rendah.
3. Ketidakstabilan keluarga: Kemiskinan dapat menyebabkan stres dan ketegangan dalam keluarga, yang dapat meningkatkan risiko perceraian dan penelantaran anak.
4. Kejahatan: Kemiskinan dikaitkan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi.

2.2.2.4 Pengertian Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

PRSE merupakan salah satu kategori dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berkaitan dengan Peraturan Menteri Sosial No. 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, bahwa PRSE adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan

pokok sehari-hari. Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa PRSE adalah perempuan dewasa yang dalam keadaan belum menikah, sudah menikah, ataupun janda, baik karena cerai atau karena meninggalnya pasangan yang memiliki faktor-faktor lain pasangan yang memiliki, faktor-faktor lain yang membuat kebutuhan sehari-hari mereka kurang tercukupi yang kemudian menimbulkan berbagai kerentanan. Dalam hal ini, perempuan atau istri sebagai seorang janda karena suami telah meninggal atau telah bercerai dengan suaminya akan menggantikan posisi seorang suami yaitu sebagai kepala keluarga dan sebagai pencari nafkah utama keluarga. Selain itu, jika seorang wanita belum menikah namun dirinya menjadi tulang punggung keluarga karena orangtuanya telah meninggal juga dapat dikategorikan ke dalam kategori PRSE.

2.2.2.5 Indikator Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 menjelaskan bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Salah satu jenis dari penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu PRSE. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 juga mengemukakan bahwa Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah, atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Adapun indikator dari Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagai berikut:

1. Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun.
2. Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
3. Pencari nafkah utama keluarga.
4. Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Berdasarkan indikator tersebut, dapat diketahui bahwa tanpa modal, tanpa pendidikan, tanpa keterampilan, mereka akan sulit untuk memperbaiki kondisi kehidupannya jika hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan demikian, makin jelas bahwa yang dinamakan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah mereka yang dilatarbelakangi oleh kehilangan suami, tidak mendapat kesempatan dalam lapangan pekerjaan, beban dan tanggung jawab yang cukup berat untuk menghidupi keluarga tanpa persiapan yang matang, serta tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya keterampilan yang dimiliki.

2.2.2.6 Faktor Penyebab Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Departemen Sosial Republik Indonesia (1996:28) mengatakan bahwa faktor penyebab munculnya masalah PRSE yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor yang menyebabkan terjadinya suatu masalah yang berasal dari dalam diri wanita tersebut yaitu adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki antara lain:

- 1) Keterbatasan fisik, yang disebabkan oleh ketidakmampuan fisik untuk melakukan kegiatan serta tingkat intelegensi yang rata-rata masih dibawah kaum pria.
- 2) Masih adanya kurang rasa percaya diri, apatis, rendah diri serta aspirasi material yang tinggi.
- 3) Aspek sosial budaya, seperti lingkungan dan masyarakat yang kurang mendukung terhadap kegiatan Perempuan didaerhanya karena sistem nilai yang berbeda

2. Faktor Eksternal

Faktor yang merupakan penyebab timbulnya masalah yang berasal dari luar diri mereka yaitu kurangnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan serta distribusi pendapatan yang kurang merata. Hal ini lebih disebabkan karena nilai mesin lebih tinggi dibanding dengan tenaga kerja perempuan apabila perempuan tersebut tidak mempunyai keterampilan khusus yang diandalkan. Kondisi seperti ini yang akan menyebabkan semakin terlebar adanya jurang pemisahan antara keadaan masyarakat ekonomi tinggi dengan masyarakat ekonomi rendah/lemah.

Berdasarkan faktor penyebab di atas, dapat kita lihat bahwa yang menjadi penyebab munculnya masalah bagi PRSE bukan hanya ada sejumlah keterbatasan dari dalam diri mereka namun juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti rendahnya kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang kurang merata. Disamping itu juga budaya, pola asuh, struktur masyarakat kurang memberikan dukungan terhadap tumbuh kembangnya kegiatan yang dilakukan perempuan.

2.2.2.7 Masalah Yang Dihadapi Oleh Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Departemen Sosial Republik Indonesia (1996:35) menyatakan bahwa masalah-masalah yang dihadapi PRSE yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan keterampilan mereka yang pada umumnya masih rendah.
2. Kesempatan kerja untuk wanita dalam proses produksi cenderung terbatas.
3. Masalah kondisi sosial lingkungan keluarga yang tidak mendukung.
4. Produktivitas dan upah rendah.
5. Masalah sosial budaya khususnya pergeseran nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat.
6. Kemampuan dan pembinaan kesejahteraan keluarga belum memadai terutama dalam pemenuhan gizi dan perawatan kesehatan.

2.2.2.8 Dampak Yang Ditimbulkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Departemen Sosial Republik Indonesia (1996:15) dampak dari masalah PRSE adalah sebagai berikut :

1. Timbul ketelantaran anak dalam keluarga akibat kondisi ekonomi yang rendah dapat menghambat kelancaran pendidikan anak dan mempengaruhi masa depannya.
2. Jumlah populasi perempuan sosial ekonomi dari tahun ke tahun semakin meningkat.
3. Muncul praktik-praktik wanita tuna susila untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya.

4. Kemampuan dan pembinaan kesejahteraan keluarga belum memadai terutama dalam pemenuhan gizi dan perawatan kesehatan.

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masalah PRSE tidak hanya menimbulkan dampak kepada individu itu sendiri, melainkan berdampak pula pada munculnya masalah-masalah yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya atau usaha untuk mengatasi masalah PRSE dengan tujuan agar permasalahan yang dialami dapat teratasi sehingga tidak berpotensi menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih kompleks.

2.2.3 Tinjauan mengenai Program Sosial dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

2.2.3.1 Pengertian Program Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan program sosial sebagai upaya sistematis dan terencana yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

2.2.3.2 Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Sabarisman, 2012: 257 mengemukakan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan serangkaian norma, nilai, dan jaringan yang dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama-sama untuk tujuan kesejahteraan. Dengan demikian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan perkumpulan dari keluarga yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, dimana saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan tinggal dalam satu wilayah

tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya. Selain itu dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggotanya, dapat memecahkan masalah sosial yang dialaminya, serta merupakan wadah pengembangan usaha bersama. Kementerian Sosial RI (2019:7) mengemukakan bahwa KUBE merupakan salah satu model penanganan fakir miskin yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas ekonomi keluarga fakir miskin agar pendapatan dan kesejahteraan meningkat. Melalui KUBE diharapkan mereka dapat saling berinteraksi dan saling bekerja sama dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi anggota KUBE serta menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan.

2.2.3.3 Tahapan Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kementerian Sosial RI (2010: 15-16) Mengemukakan Tahapan pembentukan KUBE adalah:

1. Tahap Persiapan

Kegiatan ini terdiri dari: orientasi, observasi, registrasi, identifikasi, perencanaan program penyuluhan sosial, fasilitasi pengenalan masalah, pengembangan motivasi, dan evaluasi persiapan. Pelaksana: aparat desa, pendamping sosial, penyelia.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan ini meliputi seleksi calon penerimaan pembentukan pra kelompok dan kelompok, pemilihan/penentuan jenis usaha, pelatihan pendamping, pelatihan keterampilan anggota KUBE, pemberian bantuan stimulan permodalan, pendampingan dan evaluasi. Pelaksana; aparat desa, penyelia, pendamping sosial dan dinas sosial.

3. Tahap pengembangan usaha

Kegiatan pada tahap ini meliputi: fasilitasi pengembangan usaha, pemberian bantuan pengembangan usaha, pendampingan dan evaluasi. Pelaksana: pendamping sosial, dan Dinas Sosial di instansi terkait.

4. Tahap kemitraan usaha

Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- 1) Inventarisasi sumber-sumber yang ada (sumber daya alam, sumber daya ekonomi, dan sumber daya manusia)
- 2) Membuat kesepakatan-kesepakatan
- 3) Pelaksanaan kemitraan usaha
- 4) Perluasan jaringan kemitraan usaha
- 5) Evaluasi Pelaksana: pendamping sosial dan penyedia

5. Tahap monitoring dan evaluasi

Kegiatan pada tahap ini meliputi: pengendalian dan monitoring proses pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi terhadap keberhasilan yang sudah dicapai. Pelaksana: pendamping sosial dan penyedia.

2.2.3.4 Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kementerian Sosial RI (2019:11) mengemukakan Tujuan dari KUBE yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendapatan anggota KUBE
2. Membantu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga fakir miskin anggota KUBE

3. Meningkatkan kemampuan KUBE dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan usaha
4. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi anggota KUBE
5. Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskin dan masyarakat dalam penanganan sosial ekonomi
6. Meningkatkan kemampuan anggota dalam menemukan dan mengenali permasalahan, potensi para anggota, dan sumber daya sosial ekonomi yang ada di lingkungannya
7. Meningkatkan kemampuan KUBE dalam mempertanggungjawabkan kegiatan UEP
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin.

2.2.3.5 Sasaran, Kriteria, dan Persyaratan KUBE

Kementerian Sosial RI (2019:11-12) mengemukakan Sasaran, Kriteria, dan Persyaratan KUBE yaitu sebagai Berikut:

1. Sasaran

Memenuhi kriteria miskin, terencil, dan/atau rentan sosial ekonomi serta harus masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

2. Kriteria KUBE

- 1) mempunyai potensi kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama
- 2) mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa atau nama lain dalam kecamatan yang sama

- 3) mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

3. Persyaratan anggota KUBE

- 1) kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga
- 2) telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif
- 3) berdomisili tetap dan memiliki identitas diri
- 4) memiliki potensi, keterampilan, dan motivasi berusaha.

2.2.4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

KUBE dalam proses kegiatannya ada faktor pendukung dan penghambatnya. Hermawati (2012: 128-132) menyatakan bahwa faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan KUBE sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung Beberapa faktor yang menjadi pendukung akan keberhasilan usaha kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui program KUBE, yakni:

- 1) Semangat anggota kelompok yang cukup tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui program KUBE, seperti keaktifan anggota KUBE dalam mengadakan kegiatan/pertemuan rutin, kedisiplinan anggota KUBE dalam pengelolaan administrasi dan keuangan serta penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan KUBE.

Kuatnya rasa ikatan persaudaraan di antara anggota KUBE (tercermin dari sikap saling membantu/tolong-menolong, gotong royong dan

kerjasama yang baik). semangat kerjasama dan tong royong tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kelompok, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan kelompok, seperti arisan dan simpan pinjam.

- 2) Adanya pendamping sosial yang selalu berusaha menjalin relasi sosial di antara pendamping, anggota KUBE dan masyarakat dalam memecahkan masalah, memperkuat akses dan mendayagukan potensi dan sumber kesejahteraan sosial di lokasi penelitian.
- 3) Ada dukungan dari tokoh masyarakat lokal di sekitar KUBE, baik berupa tenaga, waktu dan pembinaan.
- 4) Masih tingginya minat masyarakat miskin untuk dapat berkembang bersama dalam program KUBE.
- 5) Interaksi sosial yang tinggi atas dasar kesamaan visi dan pandangan untuk merubah kehidupan yang lebih baik.
- 6) Terdapatnya sumber potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan secara bersama.
- 7) Dukungan segenap elemen dan tokoh masyarakat dalam pembentukan KUBE ditingkat desa/kelurahan.
- 8) Terdapatnya sistem atau jaringan kelembagaan serta keberfungsian pendamping dalam mengarahkan dan membimbing KUBE sehingga kinerja KUBE relatif meningkat/lebih baik di masa mendatang.
- 9) Kearifan lokal masyarakat yang terus dapat dikembangkan secara bersama-sama.

10) Adanya Perda No 14/Tahun 2011 tentang keterlibatan semua sektor dalam penanganan kemiskinan namun dalam implementasinya perlu peningkatan koordinasi program lintas sektor terkait.

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa dalam proses kegiatan KUBE terdapat faktor pendukung berupa, semangat anggota kelompok tinggi, kuatnya persaudaraan, adanya pendamping, adanya dukungan dari tokoh masyarakat, minat masyarakat tinggi, interaksi sosial, sumber daya alam melimpah, banyak dukungan, berfungsinya jaringan kelembagaan, kearifal lokal dan adanya dasar hukum. Dengan berbagai faktor pendukung ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan KUBE.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui program KUBE ini adalah:

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan anggota kelompok, yang menyebabkan kemampuan untuk pengelolaan KUBE relatif kurang, hal ini mengakibatkan usaha yang dilakukannya kurang bisa berkembang secara optimal.
- 2) Terbatasnya kemampuan diversifikasi usaha, responden terbiasa dalam kondisi sebelumnya dan tidak berani berspekulasi untuk membuka yang baru.
- 3) Rendahnya mobilitas yang menyebabkan sempitnya pemasaran hasil usaha, kondisi ini merupakan penyebab kecilnya daya serap dana bantuan

secara maksimal. Dana bantuan yang diperoleh cenderung dimanfaatkan untuk keperluan konsumtif dibanding usaha produktif.

- 4) Adanya sikap iri hati dari masyarakat yang tidak menjadi anggota KUBE sehingga dapat mempengaruhi/menghambat anggota KUBE dalam melakukan kegiatan program yang telah disepakati.
- 5) Kurangnya keterbukaan antar pengurus dan anggota KUBE dalam mengelola usaha bersama yang pada akhirnya mendorong terjadinya rendahnya partisipasi dan semangat kebersamaan di antara para anggota KUBE dan kurang kondusifnya iklim kerja di kelompok.
- 6) Kendala budaya berupa adanya rasa kurang saling percaya di antara para anggota KUBE yang berasal dari marga yang berbeda. Apabila anggota KUBE terdiri dari berbagai etnis dan beragam karakter, budaya dan istiadat yang berbeda, berimplikasi pada perbedaan strategi dalam mengembangkan usaha KUBE.
- 7) Kondisi geografis yang kurang mendukung sehingga komunikasi menjadi kurang lancar antara KUBE dengan Pembina dan atau pendamping.
- 8) Proses pembentukan KUBE yang relatif lemah dalam asesmen, sehingga kegiatan KUBE kadang tidak berdasarkan kebutuhan riil anggota KUBE dan tidak sepenuhnya diawali dengan pemberian kegiatan bimbingan penyuluhan sosial, pelatihan manajemen usaha, UEP, IKS, dan UKS. Muatan kegiatan lebih banyak bermaterikan tertib administrasi organisasi.

2.2.3 Tinjauan tentang Pekerja sosial

2.2.3.1 Pengertian Pekerja sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Sosial Pasal 1 menyebutkan bahwa pekerja sosial merupakan “seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.” Selanjutnya praktik pekerjaan sosial merupakan “penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.” Siporin dalam Fahrudin (2014 : 61) mendefinisikan pengertian Pekerja sosial bahwa:

Pekerjaan sosial sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Lebih lanjut Siporin menyatakan bahwa Pekerjaan Sosial adalah suatu institusi sosial, suatu profesi pelayanan manusia dan suatu seni praktik teknis dan ilmiah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerjaan sosial adalah rumpun profesi yang berfokus menjalankan proses pertolongan secara profesional baik dalam cakupan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah adanya disfungsi sosial dan memunculkan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

2.2.3.2 Peran Pekerja Sosial

1. Fasilitator

Pengertian ini didasari oleh visi pekerjaan sosial bahwa “setiap perubahan terjadi pada dasarnya dikarenakan oleh adanya usaha – usaha klien sendiri, dan peranan pekerja sosial adalah memfasilitasi atau memungkinkan klien mampu melakukan perubahan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994:190-203) memberikan kerangka acuan mengenai tugas - tugas yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial :

- 1) Mendefinisikan keanggotaan atau siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mendefinisikan tujuan keterlibatan.
- 3) Mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan.
- 4) Memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan.
- 5) Memfasilitasi pendidikan: membangun pengetahuan dan keterampilan.
- 6) Memberikan model atau contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama: mendorong kegiatan kolektif.
- 7) Mengidentifikasi masalah-masalah yang akan dipecahkan.
- 8) Memfasilitasi penetapan tujuan.
- 9) Merancang solusi-solusi alternative.
- 10) Mendorong pelaksanaan tugas.
- 11) Memelihara relasi sistem.

12) Memecahkan konflik.

2. Broker

Dalam pengertian umum, seorang broker membeli dan menjual saham dan surat berharga lainnya di pasar modal. Seorang broker berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi tersebut sehingga klien dapat memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Pada saat klien menyewa seorang broker, klien meyakini bahwa broker tersebut memiliki pengetahuan mengenai pasar modal, pengetahuan yang diperoleh terutama berdasarkan pengalamannya sehari – hari. Dalam proses pendampingan sosial, ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker:

- 1) Mampu mengidentifikasi dan melokalisir sumber-sumber kemasyarakatan yang tepat.
- 2) Mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten.
- 3) Mampu mengevaluasi efektifitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan klien.

3. Mediator

Pekerja sosial sering melakukan peran mediator dalam berbagai kegiatan pertolongannya. Peran ini sangat penting dalam paradigma generalis. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Pekerja sosial dapat memerankan sebagai “fungsi kekuatan ketiga” untuk menjembatani antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya.

Compton dan Galaway (1989: 511) memberikan beberapa teknik

dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator:

- 1) Mencari persamaan nilai dari pihak - pihak yang terlibat konflik.
- 2) Membantu setiap pihak agar mengakui legitimasi kepentingan pihak lain.
- 3) Membantu pihak - pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi kepentingan bersama.
- 4) Hindari situasi yang mengarah pada munculnya kondisi menang dan kalah.
- 5) Berupaya untuk melokalisir konflik kedalam isu, waktu dan tempat yang spesifik.
- 6) Membagi konflik kedalam beberapa isu.
- 7) Membantu pihak - pihak yang bertikai untuk mengakui bahwa mereka lebih memiliki manfaat jika melanjutkan sebuah hubungan ketimbang terlibat terus dalam konflik.
- 8) Memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mau berbicara satu sama lain.
- 9) Gunakan prosedur - prosedur persuasi.

4. Pembela

Peran pembelaan dapat dibagi dua: advokasi kasus (case advocacy) dan advokasi kausal (cause advocacy) (DuBois dan Miley, 1992; Parsons, Jorgensen dan Hernandez, 1994) : Apabila pekerja sosial melakukan pembelaan atas nama seorang klien secara individual, maka ia berperan sebagai pembela kasus. Pembelaan kausal terjadi manakala klien yang dibela pekerja sosial bukanlah

individu melainkan sekelompok anggota masyarakat. Beberapa model yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan peran pembela :

- 1) Keterbukaan – membiarkan berbagai pandangan untuk didengar.
- 2) Perwakilan luas – mewakili semua pelaku yang memiliki kepentingan dalam pembuatan keputusan.
- 3) Keadilan – memiliki sebuah sistem kesetaraan atau kesamaan sehingga posisi - posisi yang berbeda dapat diketahui sebagai bahan perbandingan.
- 4) Pengurangan permusuhan – mengembangkan sebuah keputusan yang mampu mengurangi permusuhan dan keterasingan.
- 5) Informasi – menyajikan masing - masing pandangan secara bersama dengan dukungan dokumen dan analisis.
- 6) Pendukungan – mendukung partisipasi secara luas.
- 7) Kepekaan – mendorong para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap minat-minat dan posisi-posisi orang lain.

5. Pelindung

Tanggungjawab pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (protector) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan. Dalam melakukan peran sebagai pelindung (guardian role), pekerja sosial bertindak berdasarkan kepentingan korban, calon korban, dan populasi yang berisiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan

yang menyangkut: kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan pengawasan sosial. Prinsip-prinsip peran pelindung meliputi:

- 1) Menentukan siapa klien pekerja sosial yang paling utama.
- 2) Menjamin bahwa tindakan dilakukan sesuai dengan proses perlindungan.
- 3) Berkomunikasi dengan semua pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal dan rasional praktek pekerjaan sosial.

2.2.3.3 Metode Pekerja Sosial

Praktik pekerjaan sosial mencakup 3 (tiga) tingkatan dalam pelayanannya, yaitu mikro, meso, dan makro. (Zastrow dan Sarah L.H, 2019:51-54) mengemukakan bahwa: *Social workers practice at three levels: (1) micro-working on a one to one basis with ana individual, (2) mezzo-working with families and other small groups, and (3) macro-working with organizations and communities or seeking changes in statutes and social policies.* Praktik pekerjaan sosial memiliki 3 (tiga) level yaitu mikro, dimana pekerjaan sosial bekerja terfokus pada individu; meso, dimana pekerjaan sosial disini bekerja bersama keluarga dan kelompok kecil lainnya; dan makro dimana pekerjaan sosial disini bekerja dengan organisasi dan komunitas atau mengupayakan perubahan undang-undang dan kebijakan sosial.

1. Social Case Work

Pekerjaan sosial dalam praktiknya secara mikro atau case work akan membantu individu dalam menghadapi masalah pribadi ataupun sosial. Pekerja sosial membantu dan mengarahkan klien untuk bisa menyesuaikan diri

dengan lingkungannya atau untuk mengubah tekanan sosial, ekonomi tertentu yang berdampak buruk atau negatif pada dirinya.

2. *Group Work*

Pekerjaan sosial dalam praktiknya dengan kelompok membantu perkembangan intelektual, emosional, dan sosial individu melalui kegiatan kelompok. Praktik pekerja sosial dengan kelompok ini menggunakan jangka waktu yang luas. Praktik pekerja sosial dengan kelompok bisa menggunakan berbagai tipe kelompok untuk membantu klien menyelesaikan masalahnya.

3. *Community Organization*

Praktik pekerjaan sosial dalam tingkatan makro atau *community organization* yaitu membantu dan merangsang masyarakat setempat untuk bisa mengalokasikan, merencanakan, dan mengkoordinasikan upaya untuk menyediakan segala jenis kebutuhan dan mobilitas masyarakat. Zastrow (2010: 287) menyatakan bahwa: “*Community organization as a process that helps individuals, groups, and communities work together to identify social problems and develop solutions to address them.*” Pernyataan di atas menyatakan bahwa *Community Organization* adalah proses intervensi yang digunakan oleh pekerja sosial dan profesional lainnya untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah-masalah sosial dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Dapat dikatakan bahwa metode ini berkaitan dengan kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan tingkat keberfungsian sosial masyarakat. Netting (2017:319) mengemukakan bahwa COCD memiliki tiga strategi yaitu *collaboration, social*

campaign dan *contest*. Strategi yang digunakan dalam program ini adalah strategi collaboration yaitu strategi yang sering digunakan ketika anggota target setuju atau mudah diyakinkan untuk setuju dengan tindakan perubahan dan mendukung alokasi sumber daya.